

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara komprehensif mengungkapkan beberapa temuan penting terkait dengan Implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara jelas mengenai transformasi digital dalam pengelolaan tunjangan profesi guru melalui implementasi Sistem Informasi Tunjangan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kesimpulan dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk butir-butir poin untuk memberikan hasil yang jelas dan detail sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Berikut dibawah ini kesimpulan yang dapat dijelaskan:

Proses transformasi digital dalam pengelolaan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah mengubah sistem manual berbasis dokumen menjadi sistem digital yang terintegrasi melalui SIMTUN. Sebelum adanya transformasi, proses pengusulan dilakukan melalui aplikasi *Microsoft access* yang tidak terintegrasi, melibatkan pemberkasan fisik berjenjang dari sekolah hingga dinas yang mengakibatkan penumpukan berkas, serta memerlukan waktu yang lama dalam verifikasi dan validasi data oleh pegawai. Setelah adanya transformasi, pengusulan dilakukan melalui sistem *online* yang lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi secara elektronik berdasarkan kebijakan baru yang didukung dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 8 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan adanya kebijakan yang semakin mendukung, muncul produk-produk digital

1. berupa *website* dan Sistem Informasi Manajemen. Penggunaan teknologi digital terbukti mengurangi penggunaan kertas yang digunakan selama pengelolaan tunjangan profesi guru. Selain itu, para pegawai merasa lebih produktif selama melakukan pengelolaan tunjangan profesi guru menggunakan teknologi digital.
2. Implementasi SIMTUN sangat mendukung proses pengusulan tunjangan profesi guru mulai dari penarikan data dari Dapodik yang merupakan bagian *input* hingga *output* berupa penerbitan SKTP secara elektronik. Inovasi model dalam SIMTUN memudahkan pemangku kepentingan untuk melakukan analisis data secara *real-time* dalam membuat keputusan dan kebijakan. SIMTUN juga dapat membaca, mengambil, menghimpun, menyimpan, dan mengolah data yang ada di dalamnya menjadi informasi yang bermanfaat. Tingkat keamanan SIMTUN dapat terkendali dengan baik karena terpantau dan diawasi langsung oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN) telah berjalan melalui fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring & evaluasi. Dalam pengelolaan tunjangan profesi guru terdapat prinsip-prinsip yang diterapkan oleh para pegawai sesuai dengan Permendikdasmen No. 4 Tahun 2025 yang meliputi: 1) Tertib, 2) Efektif, 3) Efisien, 4) Transparan, 5) Akuntabel, dan 6) Kepatutan.
3. Faktor pendukung dalam pengelolaan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat meliputi: 1) adanya kebijakan digitalisasi yang membuat proses pengelolaan tunjangan profesi guru lebih efektif dan efisien, 2) kerja sama lintas institusi yang memperkuat hubungan dan interaksi sebagai sesama perangkat daerah, 3) adanya pemberian pendampingan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ke Cabang dinas dan sekolah, 4) diseminasi informasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berdasarkan instruksi atau arahan Pemerintah Pusat ke daerah dan cabang dinas, 5) peran pimpinan yang

memastikan pengelolaan TPG sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dan 6) komitmen kerja pegawai yang senantiasa membantu sama lain. Adapun faktor penghambatnya antara lain: 1) fitur SIM yang perlu ditingkatkan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan TPG menggunakan SIMTUN, 2) *long time data updating* yang membuat pemutakhiran data memerlukan waktu tambahan, 3) *unscheduled maintenance* yang lebih terencana agar para pengguna dapat memaksimalkan waktu yang ada pada tugas lain, 4) *unsynchronized data* yang melibatkan pengecekan dari basis data Dapodik dan BKN, 5) *error code* ketika terjadi kesalahan pengunggahan data, dan 6) *trouble network* yang mengganggu produktivitas kerja menggunakan perangkat digital.

Secara keseluruhan, implementasi SIMTUN telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengelolaan tunjangan profesi guru yang lebih tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan kepatutan. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengelolaan tunjangan profesi guru mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan hingga monitoring dan evaluasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru ASN Daerah.

Implementasi sistem informasi manajemen perlu terus dikembangkan secara berkelanjutan untuk menjawab dinamika kebutuhan pengguna di tingkat sekolah dan dinas. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mengembangkan sistem yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan tunjangan profesi guru menggunakan SIM, serta menjadi rujukan bagi Pemerintah Pusat dan Dinas Pendidikan di Provinsi lain untuk meningkatkan pengelolaan tunjangan profesi guru menggunakan SIM.

5.2. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki implikasi secara konseptual, praktis dan bagi pemangku kebijakan sebagai berikut:

1. Secara konseptual, jika Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIMTUN) sebagai bagian dari transformasi digital diterapkan secara optimal dalam reformasi birokrasi di sektor pendidikan, maka sistem pola kerja pegawai akan menjadi lebih produktif, alur birokrasi akan lebih terstruktur dengan jelas dan mudah, serta mekanisme koordinasi antar lembaga akan berjalan lebih optimal. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat teori mengenai implementasi sistem informasi manajemen dalam pengelolaan tunjangan profesi guru.
2. Secara praktis, jika hasil penelitian ini dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menangani permasalahan dalam penggunaan SIMTUN, maka kapasitas sumber daya manusia dapat diperkuat, integrasi data lintas sistem dengan instansi lain dapat dipercepat, dan fitur layanan SIMTUN dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara lokal, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi dinas pendidikan provinsi lain atau pemerintah pusat dalam pengembangan sistem serupa.
3. Secara kebijakan, jika terdapat sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan regulasi melalui sistem digital yang adaptif, maka kebijakan terkait pengelolaan tunjangan profesi dapat berjalan sebagaimana yang tercantum dalam aturan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kualitas dan keberlanjutan pengelolaan tunjangan profesi guru secara nasional.

Dengan demikian, implikasi pada penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan serta sistem informasi manajemen di sektor Pendidikan. Akan tetapi, menambah wawasan terkait peningkatan mekanisme pengelolaan tunjangan profesi

guru dan pengembangan sistem informasi manajemen yang digunakan dalam manajemen pendidik dan kependidikan di tingkat daerah.

5.3. Rekomendasi

Rekomendasi penelitian ini dibuat berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, yang telah dilakukan secara komprehensif terkait implementasi sistem informasi manajemen dalam pengelolaan tunjangan profesi guru. Rekomendasi yang dibuat ini ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat, dan peneliti selanjutnya. Adapun rekomendasi yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, perlu membuat *Manual Book* yang berisi panduan teknis langkah-langkah penginputan data di *website* Dapodik atau SIM serta menyelenggarakan pelatihan teknis secara berkala kepada operator di sekolah dan cabang dinas. Selain itu, tetap mempertahankan alur koordinasi dan komunikasi yang sudah berjalan baik hingga meningkatkan semaksimal mungkin pendampingan yang diberikan untuk mendiseminasikan arahan atau instruksi dari pusat. Terakhir, perlu adanya secara khusus kebijakan jangka panjang mengenai peningkatan dan pengembangan digitalisasi birokrasi pendidikan yang berfokus pada efisiensi pelayanan, perlindungan data, dan pemerataan akses sistem digital yang dapat diakses bagi pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam pengelolaan tunjangan profesi guru.
2. Bagi Pemerintah Pusat, perlu mengembangkan fitur integrasi penuh antara SIMTUN dan sistem lain, seperti Dapodik, BKN, dan SIMBAR agar tidak terjadi redundansi dan perbedaan data. Selanjutnya, disarankan menyediakan dan memaksimalkan kanal bantuan teknis (*helpdesk*) berbasis daring agar sekolah dapat mengakses dukungan dengan cepat. Selain itu, penting untuk mengembangkan sistem *dashboard* pemantauan *real-time* untuk mendeteksi kesalahan data yang masuk dengan meningkatkan juga fitur pengenalan *systematic error* yang ada pada SIM. Yang terakhir, membuat *planned maintenance* dan

memberitahukan notifikasi tersebut kepada pengguna di dalam SIMTUN dengan informasi perkiraan waktu dan memberitahukan pula ketika proses *maintenance* sudah selesai kepada pengguna agar bisa diakses kembali. Solusi ini berguna untuk menanggulangi *unplanned maintenance* yang terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk meneliti lebih lanjut tentang efektivitas SIMTUN di provinsi lain atau membandingkan implementasi sistem ini dengan *platform* lain seperti, SIMPKB atau TRK, serta menggali pengalaman pengguna (*user experience*) dari perspektif guru penerima tunjangan.

Dengan adanya rekomendasi yang sudah dibuat ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Perbaikan, peningkatan, dan pengembangan yang dilakukan merupakan upaya untuk menciptakan mekanisme dan pengelolaan tunjangan profesi guru yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu Pendidikan di Indonesia